

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIS
KOTA BLITAR TAHUN 2024

Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Bulanan												Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran Per Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja (Rp)	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Koordinator	Pelaksana
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	84.5 Indeks	Memverifikasi dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah (PK, Renaksi, RKT, Renja, P Renja)	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah yang diverifikasi	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			Sekretaris	Sekretaris
			Memverifikasi dokumen perencanaan anggaran Perangkat Daerah (RKA, PRKA, DPA, DPPA)	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang diverifikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Sekretaris	Sekretaris
			Memverifikasi dokumen pelaporan kinerja Perangkat Daerah (LKPI, LKJIP, LPPD, Monev RKPD, IPAK, SKM, SAKIP)	Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan kinerja Perangkat Daerah yang diverifikasi	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00			Sekretaris	Sekretaris
			Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi administrasi kepegawalan perangkat daerah	laporan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi kepegawalan perangkat daerah	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			Sekretaris	Sekretaris
			Memfasilitasi penyediaan penunjang dan pelayanan umum perangkat daerah	laporan	Jumlah laporan fasilitasi administrasi umum dan penunjang, laporan pelayanan jasa pelayanan umum, pemeliharaan dan pengadaan peralatan kantor serta l	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			Sekretaris	Sekretaris

Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Bulanan												Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran Per Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja (Rp)	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Koordinator	Pelaksana
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai Standar	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	90 %	Mengkoordinasikan pengawasan internal	laporan	Jumlah laporan koordinasi pengawasan internal	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			Sekretaris	Sekretaris
				pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			Sekretaris	Sekretaris
				draft	Jumlah draft kesepakatan kerjasama pengawasan dengan APH	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sekretaris	Sekretaris
				draft	Mengusulkan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sekretaris	Sekretaris
Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Mengkoordinasikan penyelesaian kerugian negara/ daerah	laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi penyelesaian kerugian negara/ daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			Sekretaris	Sekretaris
				laporan	Jumlah laporan monev pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			Sekretaris	Sekretaris
				laporan	Jumlah laporan koordinasi pengembangan kapasitas evaluator SAKIP	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sekretaris	Sekretaris
				laporan	Jumlah laporan koordinasi pemanfaatan aplikasi SI Patriawas untuk Update tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			Sekretaris	Sekretaris

Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Bulanan												Jumlah Anggaran Per Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja (Rp)	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Koordinator	Pelaksana
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah diisikan sebagai Zona Integritas (ZI)	1 PD	Mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan pada PD yang diisikan sebagai Zona Integritas	laporan	Jumlah laporan koordinasi pendampingan PD yang diisikan sebagai Zona Integritas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		Sekretaris	Sekretaris
Terwujudnya tata kelola pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100.00 %	Memverifikasi laporan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	laporan	Jumlah laporan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang diverifikasi	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		Sekretaris	Sekretaris
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai Standar	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti	87.50 %	Mengkoordinasikan TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti	laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		Sekretaris	Irban I, Irban II, Irbanus
	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti	90.00 %	Mengkoordinasikan TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti	laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		Sekretaris	Irban I, Irban II, Irbanus

Blitar, 2 Januari 2024

Sekretaris Inspektorat Daerah,

RATIH DEWI INDARTI, S.E., CGCAE

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197602252005012009

Plt. Inspektur Daerah,

RATIH DEWI INDARTI, S.E., CGCAE

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197602252005012009

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
KOTA BLITAR TAHUN 2024

Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Bulanan												Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran Per Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja (Rp)	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Koordinator	Pelaksana
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal sesuai standar pada wilayah 1	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	80 %	Melakukan identifikasi atas rekomendasi kadaluwarsa / tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyesuaian / pemulihan	Jumlah laporan identifikasi atas rekomendasi kadaluwarsa / tidak dapat ditindaklanjuti pada wilayah 1	laporan	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektur Pembantu Wilayah I
			Mengkoordinasikan pemanfaatan aplikasi Si Patriawas untuk Update tindak lanjut hasil pemeriksaan internal secara online pada wilayah 1	Jumlah laporan koordinasi pemanfaatan aplikasi Si Patriawas untuk Update tindak lanjut hasil pemeriksaan internal secara online pada wilayah 1	laporan	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektur Pembantu Wilayah I
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan eksternal sesuai standar pada wilayah 1	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	89 %	Mengkoordinasikan dengan BPK RI dalam rangka penyelesaian yang selesai rekomendasi kadaluwarsa / tidak dapat ditindaklanjuti	Jumlah laporan koordinasi dengan BPK RI dalam rangka penyelesaian rekomendasi kadaluwarsa / tidak dapat ditindaklanjuti pada wilayah 1	laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektur Pembantu Wilayah I
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai standar	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100.00 %	Mengkoordinasikan teknis pengawasan dengan tujuan tertentu pada wilayah 1	Jumlah laporan koordinasi pengawasan dengan tujuan tertentu pada wilayah 1	laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Jabatan Fungsional
Meningkatnya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai standar	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4.00 Dokumen	Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan	Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan	dokumen	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Jabatan Fungsional
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan sesuai standar	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70.00 %	Mengendalikan teknis (supervisi) pelaksanaan reviu Laporan Keuangan pada wilayah 1	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan yang telah disupervisi	laporan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	353,563,100.00		Inspektur Pembantu Wilayah I	Jabatan Fungsional

Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Bulanan												Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran Per Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja (Rp)	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				Satuan	Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Koordinator	Pelaksana
			Mengendalikan teknis (supervisi) pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah pada wilayah 1	laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan yang telah disupervisi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Jabatan Fungsional
			Mengendalikan teknis (supervisi) pelaksanaan reviu Laporan Kinerja pada wilayah 1	laporan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja yang telah disupervisi	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Jabatan Fungsional
			Mengendalikan teknis (supervisi) pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah pada wilayah 1	laporan	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja yang telah disupervisi	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Jabatan Fungsional
			Mengendalikan teknis (supervisi) kerjasama pengawasan internal dengan APH	BA	Jumlah BA pelaksanaan pendampingan proyek strategis yang telah disupervisi	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Jabatan Fungsional
	Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87.50 %	Mengkoordinasikan rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti pada wilayah 1	laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti pada wilayah 1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	353,563,100.00		Inspektur Pembantu Wilayah I	Jabatan Fungsional
	Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90.00 %	Mengkoordinasikan rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti pada wilayah 1		Jumlah laporan hasil koordinasi rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti pada wilayah 1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah I	Jabatan Fungsional

Pt. Inspektur Daerah,

RATHI DEWI INDARTI S.E., CGCAE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197602252005012009


Blitar, 2 Januari 2024
Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektorat Daerah,

HERU CATUR WIDYANANTORO S.T., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196604271998031002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
KOTA BLITAR TAHUN 2024

Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Bulanan												Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran Per Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja (Rp)	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Koordinator	Pelaksana
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal sesuai standar pada wilayah 2	Persentase TLHP internal yang selesai yang dilaksanakan ditindaklanjuti pada wilayah 2	80 %	Melakukan identifikasi atas rekomendasi kadaluwarsa / tidak dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan penyesuaian / pemulhan	Jumlah laporan identifikasi atas rekomendasi kadaluwarsa / tidak dapat ditindaklanjuti pada wilayah 2	laporan	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
			Mengkoordinasikan pemanfaatan aplikasi Si Patriawas untuk Update tindak lanjut hasil pemeriksaan internal secara online pada wilayah 2	Jumlah laporan koordinasi pemanfaatan aplikasi Si Patriawas untuk Update tindak lanjut hasil pemeriksaan internal secara online pada wilayah 2	laporan	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan eksternal sesuai standar pada wilayah 2	Persentase TLHP eksternal yang selesai yang dilaksanakan ditindaklanjuti pada wilayah 2	89 %	Mengkoordinasikan dengan BPK RI dalam rangka penyelesaian rekomendasi kadaluwarsa / tidak dapat ditindaklanjuti	Jumlah laporan koordinasi dengan BPK RI dalam rangka penyelesaian rekomendasi kadaluwarsa / tidak dapat ditindaklanjuti pada wilayah 2	laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,070,776,400.00		Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai standar	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100.00 %	Mengkoordinasikan teknis pengawasan dengan tujuan tertentu pada wilayah 2	Jumlah laporan hasil koordinasi teknis pengawasan dengan tujuan tertentu pada wilayah 1	laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
Meningkatnya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai standar	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4.00 Dokumen	Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan	Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan	dokumen	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional

Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Bulanan												Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran Per Program/Rencana Hasil Kerja (Rp)	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Koordinator	Pelaksana
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan sesuai standar	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70.00 %	Mengendalikan teknis (supervisi) pelaksanaan reviu Laporan Keuangan pada wilayah 1	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan yang telah disupervisi	laporan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
			Mengendalikan teknis (supervisi) pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah pada wilayah 1	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan yang telah disupervisi	laporan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
			Mengendalikan teknis (supervisi) pelaksanaan reviu Laporan Kinerja pada wilayah 2	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja yang telah disupervisi	laporan	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
			Mengendalikan teknis (supervisi) pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah pada wilayah 2	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja yang telah disupervisi	laporan	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
			Mengendalikan teknis (supervisi) kerjasama pengawasan internal dengan APH	Jumlah BA pelaksanaan pendampingan proyek strategis yang telah disupervisi	BA	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
			Mengkoordinasikan rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti pada wilayah 2	Jumlah laporan hasil koordinasi rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti pada wilayah 2	laporan	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional
			Mengkoordinasikan rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti pada wilayah 2	Jumlah laporan hasil koordinasi rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti pada wilayah 2	laporan	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Inspektur Pembantu Wilayah II	Jabatan Fungsional

Pt. Inspektur Daerah,

INSPEKTOR DAERAH

RATIH DEWI LINDARTI, S.E., CGCAE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197602252005012009

Blitar, 2 Januari 2024
Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektorat Daerah,

INSPEKTOR DAERAH

TONNY HERMAWANTO, S.T., M.T., CGCAE

Pembina (IV/a)

NIP. 197205191999011001

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
KOTA BLITAR TAHUN 2024

Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan 2024	Rencana Aksi	Output		Target Bulanan												Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran Per Sasaran Program/Rencana Hasil Kerja (Rp)	Unit/ Satuan Kerja Pelaksana	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal sesuai standar	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10,00 PD	Mengkoordinasikan teknis evaluasi penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah	laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi teknis evaluasi SPIP Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Inspektur Pembantu Khusus	Jabatan Fungsional
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai standar	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100,00 %	Mengkoordinasikan teknis pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi teknis pengawasan dengan tujuan tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	27,369,100.00	27,369,100.00	Inspektur Pembantu Khusus	Jabatan Fungsional
Meningkatnya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai standar	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4,00 Dokumen	Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan	dokumen	Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pengawasan	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	34,322,700.00	34,322,700.00	Inspektur Pembantu Khusus	Jabatan Fungsional
Meningkatnya pendampingan dan asistensi sesuai standar	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100,00 %	Mengkoordinasikan teknis evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	laporan	Jumlah laporan koordinasi evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,328,000.00	575,328,000.00	Inspektur Pembantu Khusus	Jabatan Fungsional
	Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan		Mengkoordinasikan teknis penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	laporan	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian kasus / pengaduan masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			Inspektur Pembantu Khusus	Jabatan Fungsional
	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	4,00 PD	Mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pendampingan pada PD yang diusulkan sebagai Zona Integritas	laporan	Jumlah laporan koordinasi teknis pendampingan PD yang diusulkan sebagai Zona Integritas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Inspektur Pembantu Khusus	Jabatan Fungsional
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal sesuai standar	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada Irbanus	80,00 %	Mengkoordinasikan TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada Irbanus	laporan	Jumlah laporan koordinasi TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada Irbanus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			Inspektur Pembantu Khusus	Jabatan Fungsional

Plt. Inspektur Daerah,



RATIH DEWI INDARTI, S.E., CGCAE

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 197602252005012009

Blitar, 2 Januari 2024

**Inspektur Pembantu Khusus
Inspektoral Daerah,**



TAUFIQ RACHMAN HAKIM, S.Sos., MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196909011989031002